

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan adalah modal awal peserta didik untuk mengenal lingkungan sehingga dapat berinteraksi dan menjalani hidup dengan orang lain. Pendidikan kejuruan atau *vocational education* adalah jenjang pendidikan yang mencetak peserta didik mandiri yang dibekali kompetensi keahlian dan keterampilan. Peserta didik dalam pendidikan kejuruan telah dibekali dengan pengetahuan serta keterampilan untuk terjun ke dunia kerja. Berikut ini adalah pengertian Pendidikan kejuruan menurut para ahli dan undang-undang.

Pertama pernyataan Kuswana (2013: 4) menyebutkan :

Lembaga pendidikan formal(jalur persekolahan) dan lembaga pendidikan dan pelatihan (jalur luar sekolah/non formal), secara proporsional dan profesional akan memperoleh pengakuan dan penghargaan(sertifikasi) sejajar dan sesuai dengan klasifikasi kompetensi yang diujikan oleh lembaga independen.

Proses pembelajaran pendidikan kejuruan mengedepankan kompetensi, kemampuan dan keahlian khusus yang terencana secara sistematis sehingga dapat mencetak peserta didik yg kompeten di bidang nya, dipersiapkan untuk siap bekerja dan memasuki dunia kerja dan kelompok kerja. Dalam penyelenggaraan Pendidikan kejuruan sesuai standar proses pembelajaran maka penyelenggaraan Pendidikan harus dilakukan secara proporsional dengan aturan yang telah distandardkan secara nasional. Proses belajar mengajar dalam kelas yang dilakukan oleh guru dilakukan menurut

21

RPP dan silabus yang telah disusun sebelumnya sehingga prosesnya dapat sesuai dengan klasifikasi kompetensi. Proses pembelajaran yang profesional akan memudahkan siswa dalam memahami materi sehingga akan menghasilkan lulusan dengan kompetensi dan keahlian yang terintegrasi. Keberlangsungan proses pembelajaran dalam pendidikan kejuruan terbagi menjadi beberapa jenjang. Jenjang setiap pendidikan kejuruan berbeda-beda tergantung pada kebijakan setiap sekolah. Sekolah berhak menentukan sendiri jenjang pendidikan mana yang digunakan sebagai rujukan penyelenggaraan pendidikan dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu internal (SPMI).

Jenjang pendidikan terdapat berbagai tingkat pendidikan, menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 menyebutkan :

Pendidikan kejuruan merupakan Pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat dengan berbagai jenis program keahliannya masing-masing. Program Pendidikan 3 tingkat (level) tau 3 tahun, dan program Pendidikan 4 tingkat atau 4 taun yang masing-masing disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di dunia kerja.

Proses pembelajaran dalam Pendidikan kejuruan yang terbagi dalam berbagai jenjang diatas disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi peserta didik. Kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik harus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja ataupun yang memiliki peluang yang besar untuk di butuhkan di dunia kerja. Proses akhir dari Pendidikan kejuruan yaitu seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 berikut:

22

Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan yang membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan kejuruan peserta didik dituntut untuk menguasai ilmu serta teknologi yang digunakan dalam dunia kerja sehingga setelah lulus nanti peserta didik telah mampu mengembangkan ilmunya untuk terjun ke dunia kerja. Pendidikan kejuruan mengandung pengertian yang luas seperti penjabaran oleh Rifai (2014: 33) dalam Jurnal pengembangan model penjaminan mutu pendidikan sekolah menengah kejuruan berpendapat bahwa :

Pendidikan menengah kejuruan adalah aktifitas Pendidikan menengah yang memberikan serangkaian pelajaran yang mempersiapkan peserta didik dengan isi yang sesuai dengan tuntutan akademik, pengetahuan dan keterampilan teknis yang relevan melalui pembelajaran berbasis kompetensi, akhlak mulia serta keterampilan peserta didik untuk dapat bekerja pd profesi saat ini atau profesi yang ada, mengikuti Pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruan atau hidup mandiri dengan lama studi 3 atau 4 tahun disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di dunia kerja.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat dirumuskan bahwa pendidikan kejuruan adalah jenjang Pendidikan menengah yang mengedepankan bakat kompetensi, keterampilan dan keahlian khusus secara relevan yang terencana secara sistematis sehingga dapat mencetak peserta didik yang kompeten di bidang profesi dalam jenjang 3 tahun maupu 4 tahun, mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan secara profesional dan adaptif sehingga dapat langsung terjun dunia kerja sesuai tuntutan dunia kerja.

Dalam penyelengaraan pendidikan kejuruan terdapat beberapa standar yang perlu diperhatikan oleh sekolah kejuruan sebagai pedoman yang harus dipenuhi.

Menurut pasal 1 ayat 17 Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 dan pasal 1 ayat 91 PP No.19 Tahun 2005 menyatakan aspek utama penyelengaraan pendidikan kejuruan berdasarkan standar nasional Pendidikan (SNP) terdiri dari 8 standar yaitu : (1) Isi, (2) proses, (3) kompetensi lulusan, (4) tenaga kependidikan, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan, (7) pembiayaan dan, (8) penilaian pendidikan.

Penyelengara pendidikan kejuruan diberikan wewenang untuk menentukan tujuan pendidikan kejuruan, visi misi dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional dan potensi yang dimiliki. Wewenang yang diberikan kepada pendidikan kejuruan untuk mengatur penyelengaraan pendidikan kejuruan ini dikenal dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI).

Ahli pendidikan kejuruan, Prosser (1950: 217-232) menyatakan terdapat 16 prinsip-prinsip pendidikan kejuruan atau dikenal dengan istilah 16 teori Prosser. Ada beberapa prinsip yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran diantaranya: (1) Pendidikan kejuruan akan efisien apabila peserta didik dilatih dalam lingkungan yang sesuai dengan kondisi nyata (replica) dimana lulusan akan bekerja, (2) Latihan kejuruan akan efektif apabila tugas-tugas yang diberikan dalam operasional kerja yang sama, alat yang sama, dan mesin yang sama dengan kondisi pekerjaan, (3) Pendidikan kejuruan akan efektif apabila instruktur memiliki pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan terhadap operasi dan proses yang diajarkan, (4) Pendidikan kejuruan akan efisien apabila metode pengajaran dan

hubungan dengan peserta didiknya dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu dari kelompok yang dilayani.

Pendidikan kejuruan menetapkan kebijakan penyelengaraan proses pembelajaran sendiri yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah dengan mempertimbangkan kemajuan bersama. Penyusunan kebijakan dalam proses pembelajaran telah disesuaikan dengan sumberdaya, potensi dan kebutuhan yang dimiliki sehingga setiap pendidikan kejuruan akan memiliki kebijakan berbeda-beda. Kebijakan semacam ini akan berdampak baik bagi pendidikan kejuruan favorit yang memiliki teknologi dan sumberdaya yang maju. Pendidikan kejuruan akan bersaing untuk meningkatkan mutu dan menghasilkan lulusan yang kompeten dengan perbaikan di berbagai bidang terutama dalam proses pembelajaran. Mutu pendidikan kejuruan akan meningkat seiring dengan ketatnya persaingan yang terjadi. Pendidikan kejuruan akan berlomba-lomba untuk menghasilkan mutu yang baik dan berkompeten untuk meningkatkan citra sekolah dimata calon peserta didik dan dunia industri. Persaingan ini akan memajukan mutu Pendidikan kejuruan secara drastis dan konsisten untuk menjaga kualitas mutunya tetap baik. Pendidikan kejuruan yang tidak mampu bersaing secara otomatis akan tertinggal dan ditinggalkan. Secara keseluruhan kebijakan ini sangat berdampak baik bagi Pendidikan kejuruan di Indonesia, perbaikan dalam berbagai bidang secara mandiri ini akan meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dan kompetensi peserta didik secara lebih dinamis, kompetitif dan berdaya saing tinggi.

2. Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan yang bermutu adalah Pendidikan yang menimbulkan kesinambungan antara input, proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Definisi Penjaminan mutu oleh Sani (2015: 7) menyebutkan "Suatu sistem manajemen yang terus menerus mengusahakan perbaikan dan peningkatan mutu yang diarahkan untuk meningkatkan kepuasan *stakeholders* dengan biaya yang paling efisien". Sistem penjaminan mutu dalam Pendidikan kejuruan merupakan cara untuk mengelola potensi pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan untuk mewujudkan lulusan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan dunia industri tanpa menggunakan anggaran yang besar. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut Pendidikan kejuruan untuk terus berupa meningkatkan kualitas peserta didik. Peningkatan kualitas ini harus terus dilakukan untuk mengimbangi perubahan tuntutan pasar yang terus berubah-ubah. Perubahan sistem penjaminan mutu oleh pendidikan kejuruan dilakukan secara kontinyu dan terus menerus memerlukan sumberdaya yang mampu berinovasi secara kritis dan dinamis mengikuti perkembangan teknologi. Sistem penjaminan mutu merupakan hasil dari tuntutan internal dan eksternal pendidikan kejuruan untuk meningkatkan kualitasnya. Menurut Sani (2015: 9) menyatakan :

Sistem penjaminan mutu adalah pengembangan konsep penjaminan mutu (*quality assurance*) yang berusaha menciptakan sebuah budaya dengan cara mendorong semua anggota organisasi untuk dapat memuaskan para peserta didik atau *stakeholders* eksternal.

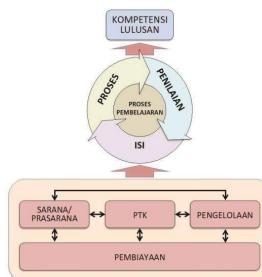
Pembiasaan sistem penjaminan mutu dalam suatu Pendidikan kejuruan dilakukan secara bertahap mengikuti kultur dan lingkungan kejuruan. Pengembangan sistem penjaminan mutu disusun sendiri oleh penyelengara Pendidikan kejuruan dan disesuaikan dengan tujuan dan visi misi Pendidikan kejuruan.

Penjaminan mutu dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan berbagai aspek untuk mendapatkan tingkat kesesuaian seperti harapan internal dan eksternal. Perbaikan penjaminan mutu ini dilakukan secara menyeluruh dan merata. Menurut Sani (2015: 166) "Pada umumnya terdapat 3 jenis tingkatan penjaminan mutu yaitu; Penjaminan sistem, Penjaminan produk, dan penjaminan proses". Penjaminan sistem merupakan pengecekan terhadap sistem mutu untuk mengetahui kesesuaian dengan standar, tahap ini merupakan persiapan awal sebelum proses pembelajaran dilakukan. Penjaminan proses dilakukan saat proses belajar mengajar dilakukan, penjaminan mutu ini merupakan komponen yang menentukan keberhasilan penyusunan penjaminan sistem dan ketercapaian penjaminan produk. Penjaminan produk merupakan evaluasi terhadap produk untuk mengetahui kesesuaian dengan standar. Penjaminan produk digunakan untuk mengetahui proses, hasil akhir dan penerapan di lapangan. Ketercapaian penjaminan produk dapat dilihat dari pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai oleh peserta didik.

Sistem penjaminan mutu memiliki kriteria pencapaian dalam berbagai aspek. Aspek aspek yang dinilai dalam penjaminan mutu ini mencakup delapan standar pendidikan yaitu mutu lulusan, tenaga kependidikan, kurikulum, proses pembelajaran, Penilaian pembelajaran, layanan pembelajaran, pembiayaan dan

27

layanan sekolah. Berdasarkan dari berbagai aspek tersebut, yang paling mendasari seluruh kegiatan adalah proses pembelajaran. Aspek proses pembelajaran memiliki peranan yang sentral dan memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi untuk mencapai sistem penjaminan mutu. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari gambar 1.



Gambar 1. Keterkaitan Seluruh aspek dengan standar proses
Sumber: Dirjen Pendidikan, (2016: 29)

Penjaminan mutu merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan, manfaat dan tahapan yang digunakan sebagai panduan penyelengaraan Pendidikan kejuruan. Tujuan Penjaminan mutu pendidikan menurut Sani (2015: 7) yaitu

Peningkatan mutu layanan Pendidikan, memperbaiki produktivitas dan efisiensi Pendidikan melalui perbaikan kinerja sekolah, serta peningkatan mutu kinerja dalam upaya mnghasilkan lulusan Pendidikan yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan stakeholders.

Selain memiliki tujuan, penjaminan mutu juga memiliki manfaat antara lain; memperjelas visi, misi, dan tujuan sistem pendidikan, memungkinkan seluruh warga

28

sekolah terlibat dalam pemilihan sistem, memperjelas pembagian tugas, memiliki orientasi mencapai standar, terjadi *cross check* terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Secara umumnya penjaminan mutu melibatkan pihak internal dan eksternal sekolah dalam penyusunan, penyelenggaraan dan evaluasinya. Pengembangan penjaminan mutu ini berbeda dari umumnya karena dilakukan oleh penyelenggara pendidikan kejuruan sendiri/internal secara keseluruhan atau sistem penjaminan mutu internal (SPMI).

Hasil penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan ditunjukkan dengan terwujudnya sekolah yang secara sadar, mandiri dan berkesinambungan menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Indikator dari pendidikan kejuruan yang menjalankan pendidikan yang bermutu adalah menjalankan seluruh tahapan dalam siklus sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan serta menerapkan standar nasional pendidikan pada seluruh proses manajemen maupun proses pembelajaran di sekolah.

3. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015

Sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 merupakan standar internasional yang mengatur tentang manajemen mutu. Awal penerapan ISO hanya digunakan dalam dunia industri namun dengan berjalanannya waktu, perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat ISO 9001: 2015 diimplementasikan dalam dunia Pendidikan dengan berbagai perubahan dan revisi.

ISO 9001: 2015 merupakan standar internasional yang digunakan dalam sistem manajemen mutu. Manajemen mutu memiliki jangkauan yang luas salah satunya dalam bidang Pendidikan. Manajemen mutu dalam Pendidikan digunakan sebagai panduan penyelenggaraan Pendidikan kejuruan. Penerapan standar ISO dalam proses pembelajaran Pendidikan kejuruan di buktikan dengan sertifikat ISO 9001: 2015. Sertifikat ISO dikeluarkan melalui Lembaga sertifikasi internasional melalui proses audit internal dan eksternal.

Manajemen mutu Pendidikan kejuruan dalam proses pembelajaran dapat tersertifikasi ISO 9001: 2015 karena menerapkan prinsip dasar manajemen mutu. Prinsip dasar manajemen mutu meliputi focus pelanggan, kepemimpinan, Keterlibatan orang lain, pendekatan proses, pendekatan pada sistem manajemen, peningkatan terus-menerus, pengambilan keputusan berdasar fakta dan hubungan pemasok yang saling menguntungkan.

Manajemen mutu ISO 9001: 2015 merupakan sistem yang dilaksanakan oleh Pendidikan kejuruan untuk menjamin mutu proses pembelajaran. Pelaksanaan sistem manajemen ISO 9001: 2015 pendidikan kejuruan dalam proses pembelajaran terdapat kelebihan dan kelemahan sehingga membutuhkan SPMI sebagai penyempurnaanya.

Tahap penjaminan mutu ISO 9001: 2015 dalam proses pembelajaran di Pendidikan kejuruan merupakan upaya peningkatan penjaminan mutu secara terus menerus. Peningkatan penjaminan mutu ini meliputi 4 tahap seperti pernyataan (Abuhav, 2017: 417) yaitu :

- a. *Plan* (Merencanakan solusi sebuah masalah)

Perencanaan penyusunan penjaminan mutu dimulai dengan pembentukan tim inti, struktur manajemen mutu, pengelolaan sarana prasarana, SDM, pemetaan peserta didik, penyusunan dokumen manual mutu, dan bursa kerja.

b. *Do* (Pelaksanaan rencana perbaikan mutu)

Pelaksanaan penjaminan mutu ISO 9001: 2015 Pendidikan kejuruan berpedoman dari Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP). Pelaksanaan penjaminan ini dilakukan secara terus menerus dan dinamis mengikuti perkembangan zaman.

c. *Check* (Analisis hasil perencanaan)

Perencanaan penjaminan mutu ISO 9001: 2015 berupa dokumen mutu dan catatan mutu yang digunakan oleh penyelengara Pendidikan kejuruan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu proses pembelajaran.

d. *Action* (Standarisasi hasil perbaikan mutu yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan standar)

Penetapan standar penjaminan mutu ISO 9001: 2015 dilakukan setelah dilaksanakannya audit internal, analisis data, pengajuan pendapat dan keluhan pelanggan. Seluruh komponen tersebut menjadi pertimbangan dalam penetapan mutu yang dilakukan melalui rapat tim penjaminan mutu.



Gambar 2. Model Penjaminan Mutu ISO 9001

Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015 dalam proses pembelajaran Pendidikan kejuruan bertujuan untuk mencapai pelayanan terbaik dengan berstandar internasional. ISO 9001: 2015 merupakan standar internasional manajemen mutu dengan mekanisme standar yang disusun, disepakati, dan diterapkan oleh Pendidikan kejuruan dalam menjalankan aktivitas dan proses pembelajaran sesuai persyaratan dan kualifikasi yang telah dispesifikasi oleh Lembaga penjaminan mutu. Pengembangan model penjaminan mutu didasarkan pada standar mutu ISO 9001: 2015 dalam penyusunannya.

4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah cara untuk meningkatkan mutu peserta didik dengan memberikan kebebasan kepada Pendidikan kejuruan untuk mengambil keputusan sendiri. Kebebasan ini diberikan kepada seluruh penyelengara Pendidikan untuk mengontrol proses pembelajaran Pendidikan. Dalam model SPMI ini seluruh manajemen mutu ditetapkan menurut karakteristik dan kebutuhan masing-masing pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan memiliki tanggung jawab lebih besar dalam hal kemajuan dan perkembangan kualitas pendidikannya.

Meskipun Pendidikan kejuruan bebas menentukan mutunya sendiri tetapi harus berpedoman pada standar nasional Pendidikan.

Hal ini berarti SPMI merupakan model penjaminan mutu proses pembelajaran Pendidikan kejuruan yang memberikan kewenangan sepenuhnya dalam penyelenggaran pendidikan kepada pihak internal kejuruan untuk meningkatkan mutu proses pendidikannya dengan berdasar pada standar nasional Pendidikan. Sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu :

Satuan pendidikan berperan dalam melaksanakan sistem yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu Pendidikan untuk menjamin terwujudnya Pendidikan yang bermutu dalam rangka memenuhi atau melampaui SNP.

Tujuan penyelenggaraan SPMI dalam proses pembelajaran adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan melalui kreativitas dan kemandirian pendidikan kejuruan dalam pengelolaan potensi yang ada, meningkatkan partisipasi subyek pendidikan kejuruan dalam penyelenggaraan Pendidikan melalui musyawarah, Meningkatkan tanggung jawab warga pendidikan kejuruan dengan mutu pendidikannya. Meningkatkan kompetisi dalam lingkup lokal maupun nasional terkait mutu masing-masing pendidikan kejuruan.

Selain tujuan diatas, SPMI juga memiliki manfaat antara lain untuk Memberikan pengaruh langsung terhadap peserta didik, tenaga pengajar dan warga pendidikan kejuruan terkait kebijakan dan kewenangan mutu, memaksimalkan potensi sumber daya lokal, efektivitas dalam pembinaan peserta didik terkait proses

33

belajar, hasil belajar dan sarana pembelajaran, adanya perhatian lebih terhadap setiap kewenangan karena keterlibatan partisipasi aktif seluruh warga pendidikan kejuruan. Selain memiliki manfaat SPMI juga memiliki kelemahan seperti menurut Soenarto (2011: 41) yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah cenderung belum dilaksanakan secara terencana dan efektif".

Penyelenggaraan penjaminan mutu internal di lingkungan Pendidikan kejuruan dilakukan oleh tim SPMI. Tim SPMI dalam satuan Pendidikan disebut dengan Tim Penjaminan Mutu Sekolah (TPMS) yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah. TPMS bertugas melakukan audit internal terhadap penjaminan mutu.

Tugas TPMS dalam menjalankan tugas penjaminan mutu internal menurut Sani (2018: 43) yaitu :

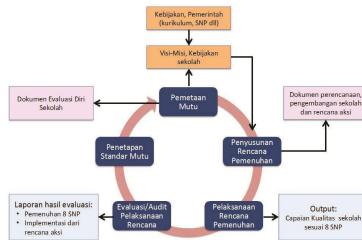
(1) Mengkoordinasikan pelaksanaan SPMI; (2) Melaksanakan pemetaan mutu di satuan Pendidikan; (3) Membingka, mendampingi, dan supervise warga sekolah dalam pemenuhan mutu; (4) Memonitoring dan evaluasi program pemenuhan mutu Membuat rekomendasi kepada kepala sekolah;

Penjaminan mutu internal pendidikan dalam pengembangan ini difokuskan pada Standar proses pembelajaran. Penjaminan mutu dalam proses pembelajaran ini harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu sehingga akan memperoleh pencapaian yang signifikan.

Sistem penjaminan mutu internal ini dilaksanakan di satuan pendidikan kejuruan dengan mengikuti siklus sebagaimana terlihat pada Gambar 3. Siklus

34

tersebut terdiri atas Pemetaan Mutu, Penyusunan Rencana Pemenuhan, Pelaksanaan Rencana Pemenuhan, Evaluasi/Audit, Pelaksanaan Rencana, dan Penetapan Standar mutu.



Gambar 3. Siklus Penjaminan Mutu Internal
Sumber: Dirjen Pendidikan, (2016: 41)

Penerapan prinsip PAKEM dalam proses pembelajaran dilakukan dengan langkah yang sistematis. Siklus Penjaminan Mutu Internal menurut Sani (2015: 32-35) memiliki beberapa tahapan proses yang dijabarkan dalam gambar 3 diatas dengan tahap-tahap berikut:

a. Penetapan Standar mutu/Instrumen

35

Standar mutu digunakan sebagai patokan dalam penjaminan mutu proses pembelajaran dalam Pendidikan kejuruan. Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal dalam menyelenggarakan Pendidikan. Kriteria SNP yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan kejuruan yaitu Sesuai dengan Visi Misi dan tujuan satuan Pendidikan kejuruan, Sesuai dengan kondisi satuan Pendidikan kejuruan dan berdasarkan prioritas.

b. Pemetaan Mutu

Pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pendidikan kejuruan memilah mutu berdasarkan instrument SNP proses pembelajaran sehingga di dapatkan pengelompokan sesuai dengan kriteria standar proses. Setelah terkelompok maka data pemetaan mutu dianalisis dan pengambilan kesimpulan. Luaran dari proses pemetaan yaitu diperoleh peta mutu sebagai *baseline* masalah yang dihadapi dan rekomendasi perbaikannya.

c. Penyusunan Rencana Pemenuhan

Perencanaan pemenuhan mutu dilaksanakan dengan menggunakan peta mutu sebagai masukan utama, disamping dokumen kebijakan pemerintah seperti kurikulum dan standar nasional pendidikan, serta dokumen rencana strategis pengembangan sekolah yang paling efektif untuk pemenuhan mutu dengan pembuatan dokumen resmi sesuai dengan SNP. Dokumen ini digunakan oleh tim penjaminan mutu sekolah

36

(TPMS) dalam menyelenggarakan penjaminan mutu pembelajaran proses pendidikan kejuruan.

d. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

Pemenuhan mutu ini dilaksanakan meliputi kegiatan pengelolaan kegiatan proses pembelajaran. Luaran dari kegiatan Pelaksanaan Rencana Mutu ini adalah terjadinya pemenuhan mutu pendidikan dan capaian SNP yang ditetapkan pada Tahap c di satuan pendidikan.

e. Evaluasi /audit Mutu

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun. Pengendalian mutu ini bertujuan agar pemenuhan mutu sesuai dengan tujuan dan rencana pemenuhan mutu. Tahap evaluasi/audit dilakukan secara bertahap dan sistematis sesuai SNP. Luaran dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan pemenuhan standar proses dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. Selain itu juga rekomendasi tindakan perbaikan jika ditemukan adanya penyimpangan dari rencana dalam pelaksanaan pemenuhan mutu ini. Dengan demikian ada jaminan kepastian terjadinya peningkatan mutu berkelanjutan. Peningkatan mutu ini ditunjukkan dengan indicator-indikator penentu keberhasilan penjaminan mutu.

Indikator pencapaian pemenuhan mutu yang menentukan keberhasilan pemenuhan mutu dapat dilihat dari peningkatan budaya mutu proses pembelajaran

37

dalam satuan Pendidikan kejuruan secara berkesinambungan dan terus menerus mulai dari *Input, Proses, Output, dan Outcome* (Wibawa, 2017: 169) .

Indikator Kriteria keberhasilan penjaminan mutu dapat dilihat dalam deskripsi berikut:

a. Input

Visi, misi, tujuan, sasaran, struktur organisasi, input manajemen, input input sumberdaya satuan Pendidikan kejuruan berkualitas.

b. Proses

Terjadi perubahan kearah lebih baik dalam pengelolaan kelembagaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan program dalam proses belajar mengajar.

c. Output

Berfungsiya organisasi Tim penjaminan mutu sekolah (TPMS) dan mampu menjalankan alur penjaminan mutu secara terstruktur.

d. Outcome

Pengelolaan Penjaminan mutu meningkat sesuai standar dan terbentuknya budaya mutu dalam satuan Pendidikan kejuruan.

Pencapaian indicator Keberhasilan penjaminan mutu internal Pendidikan kejuruan membutuhkan perangkat dalam fungsi nya. Perangkat tersebut dapat berupa procedural maupun akuntabel yang sesuai dengan prinsip penjaminan mutu. Beberapa

38

perangkat dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu (Sani, 2018: 155) antara lain;

a. Kebijakan SMK

Kebijakan SMK merupakan dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu SMK memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelengaraan pendidikan kejuruan sehingga terwujudnya budaya mutu pada pendidikan kejuruan tersebut. Dokumen ini berisi latar belakang, tujuan, strategi, prinsip dan arah dalam pelaksanaan penjaminan mutu.

b. Manual Mutu

Manual Mutu adalah dokumen petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan penjaminan mutu dalam pendidikan kejuruan. Dokumen manual mutu disatukan dengan dokumen prosedur mutu, dokumen ini berisi uraian tentang cara pengimplementasian kebijakan SPMI.

Manual mutu berisi visi, misi dan tujuan proses Pendidikan kejuruan. Manual mutu pada setiap Pendidikan kejuruan berbeda-beda karena ditetapkan berdasarkan RAK, struktur organisasi, tata kerja UPMS dan RAKS. Manual mutu mencakup prosedur kerja, instruksi kerja dan dokumen lain yang sesuai dengan potensi Pendidikan kejuruan. Manual mutu merupakan panduan bagi seluruh warga Pendidikan kejuruan dalam mengembangkan standar mutu, melaksanakan

39

penjaminan mutu, melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut yang berkesinambungan. Manual mutu ini harus komitmen karena dijadikan acuan untuk menjaga konsistensi dan keterikatan Bersama sesuai arah tujuan yang telah disepakati.

c. Standar SPMI

Standar SPMI merupakan dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi standar pendidikan kejuruan untuk mewujudkan visi misinya. Standar SPMI harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

d. Formulir SPMI

Formulir SPMI merupakan dokumen yang berguna untuk mencatat informasi tentang pencapaian standar SPMI dalam pendidikan kejuruan. Terdapat bermacam-macam formulir pendidikan kejuruan yang digunakan sesuai fungsinya masing-masing standar SPMI pendidikan kejuruan yang mengimplementasikan.

Kriteria sistem penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah yang baik menurut Birzea (2005: 37) yaitu : (1) memperjelas tujuan peraturan pendidikan dan pemerintah mengarahkan serta mendukung dialog yang melibatkan sekolah dan pemangku kepentingan, dengan inti dialog menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan "mutu" dan bagaimana mutu tersebut dapat diukur, (2) menunjukkan pertanggung jawaban dalam memastikan mutu dalam sistem sekolah pada pelaku

40

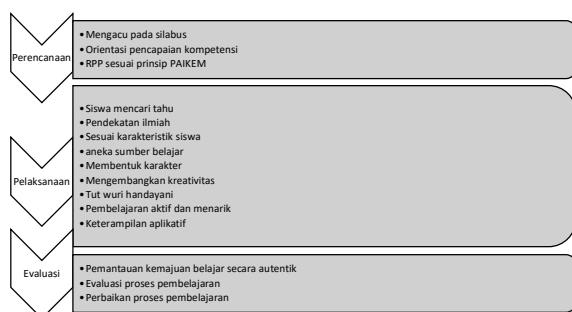
utama, yaitu sekolah dan guru-gurunya sendiri, (3) membantu menciptakan akuntabilitas atas tugas sehari-hari di sekolah dan kelas serta komitmen bersama terhadap standar yang tinggi.

Pengembangan model SPMI dalam penelitian ini diadaptasi sehingga menghasilkan penjaminan mutu yang sesuai dengan pelaksanaan proses pembelajaran.

5. Standar Proses

Standar proses adalah parameter pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan yang dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menantang, kreatif, menyenangkan dan sesuai dengan bakat minat untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Setiap satuan Pendidikan perlu melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta menilai proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kompetensi lulusan. Acuan yang digunakan dalam menetapkan standar proses **STANDAR PROSES**, 22 Tahun 2016 tentang standar proses Pendidikan dasar dan menengah. Tahapan proses pembelajaran dalam pendidikan kejuruan di jabarkan dalam kriteria mutu yang harus dicapai oleh satuan pendidikan kejuruan seperti gambar 4 berikut ini :

41



Gambar 4. Kriteria Mutu Proses Pembelajaran
Sumber : Sani (2018: 71)

a. Perencanaan

Perencanaan/persiapan merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru sebelum melakukan proses pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Persiapan proses pembelajaran memiliki standar mutu yang meliputi Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran merupakan upaya penyaluran pengetahuan dan keterampilan guru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi siswa untuk belajar.

c. Evaluasi

Evaluasi pembelajaran merupakan pemantauan/audit mutu internal pelaksanaan pembelajaran agar sesuai dengan standar proses untuk meningkatkan

kompetensi *softskill* dan *hardskill* siswa. Hasil penilaian digunakan untuk merencanakan program perbaikan pembelajaran.

Proses pembelajaran dalam Pendidikan dilakukan dengan 3 tingkat pendekatan taksonomi yakni (a) Krathwohl untuk pendekatan sikap (b) Dyers untuk proses pembelajaran keterampilan dan (c) Bloom dan Anderson untuk pendekatan pengetahuan (Kuswana, 2013: 125). Ketiga kompetensi tersebut merupakan perolehan dari proses pembelajaran yang merupakan hasil interaksi antar peserta didik dan guru. Dalam mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya konstekstual maka sangat disarankan menggunakan metode *teaching factory* dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

Pencapaian proses pembelajaran dilakukan oleh guru terhadap kompetensi hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis dan terprogram dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis atau lisan.

Supervisi proses pembelajaran diselenggarakan oleh berbagai komponen, menurut peraturan mentri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses pembelajaran, kepala sekolah dan pengawas satuan Pendidikan wajib melakukan pengawasan proses pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembelajaran. Supervisi dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, difokuskan pada kinerja guru dalam proses pembelajaran. Bakrun (2018: 141) menyebutkan faktor pendukung spesifik untuk

penyelarasan dan penguturan kompetensi abad 21 mencakup pengembangan kurikulum, perangkat pembelajaran, pengembangan instrument penilaian dan penguatan kompetensi guru melalui manajemen berbasis sekolah.

Proses pembelajaran yang bermutu dihasilkan melalui penjaminan mutu yang berstandar. Pemenuhan standar mutu dalam proses pembelajaran diwujudkan dengan adanya SPMI dalam proses pembelajaran untuk menjamin pelaksanaan proses pembelajaran berjalan sesuai tujuan pendidikan.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Atika (2017) meneliti pelaksanaan standar proses di 13 sekolah belum memenuhi kriteria yang ditetapkan Permendikbud Nomor 65 tahun 2013, baik dari komponen perencanaan, pelaksanaan, penilaian hingga pengawasan. Proses pembelajaran yang tidak sesuai standar nasional menyebabkan ketidak sesuaian dengan kompetensi yang dibutuhkan industri yang dapat menambah jumlah pengangguran.
2. Suwandi (2016) menemukan hasil bahwa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran dapat bersumber pada ketidaksesuaian kualifikasi guru dengan kualifikasi pelamar, formasi tidak sesuai dengan kebutuhan, dan mutasi guru yang tidak didasarkan pada kualifikasi guru.
3. Rifai (2014) Mengembangkan model penjaminan mutu internal SMK dengan komponen : penetapan standar mutu, penetapan prosedur operasional standar mutu, pelaksanaan-pemantauan, evaluasi ketercapaian standar mutu dan

komponen peningkatan sebagai kesatuan dengan tujuan untuk memenuhi standar mutu pendidikan

4. Soenarto (2011) dalam penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah cenderung belum dilaksanakan secara terencana dan efektif.

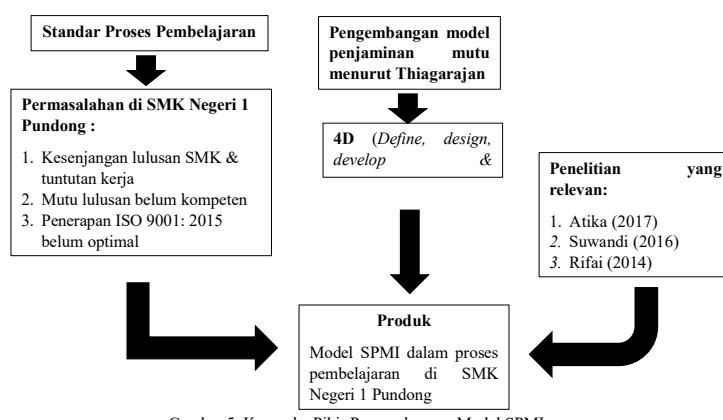
C. Kerangka Pikir

Pendidikan kejuruan merupakan penyelengara pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh bidang industri. Upaya pemenuhan kompetensi dan keterampilan lulusan yang berdaya saing dilakukan dengan pengembangan proses pembelajaran secara dinamis sesuai perkembangan. Proses pembelajaran dalam pendidikan kejuruan membutuhkan standar untuk menjamin mutu lulusannya. Standar mutu yang digunakan sebagai acuan penyelengaraan pembelajaran didasarkan pada standar nasional pendidikan (SNP).

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan model system penjaminan mutu secara internal dalam proses pembelajaran yang sesuai diterapkan di SMK Negeri 1 Pundong. Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi secara *softskill* maupun *hardskill*.

Pengembangan model dilakukan dengan metode penelitian dan pengembangan 4-D dengan tahapan : *define, design, develop, disseminate*. Dengan demikian, model penjaminan mutu internal dalam proses pembelajaran yang dihasilkan dapat dijadikan

model penjaminan mutu yang baku untuk SMK. Selanjutnya untuk melengkapi penelitian maka disusun panduan penggunaan model SPMI dalam proses pembelajaran. Dalam bentuk diagram, kerangka berpikir disajikan pada gambar 5.



Gambar 5. Kerangka Pikir Pengembangan Model SPMI

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir maka dapat diuraikan dan dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil pendefinisian kebutuhan sistem penjaminan mutu dalam proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Pundong?
2. Bagaimana hasil rancangan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Pundong?

3. Bagaimana hasil pengembangan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Pundong?
4. Bagaimana tingkat pemahaman guru terhadap sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam proses pembelajaran yang dikembangkan di SMK Negeri 1 Pundong?